Sistem Ekonomi Indonesia

Penulis :

Hasna Wijayati

Penerbit

Unisri Press © 2023

Sistem Ekonomi Indonesia

Penulis:
Hasna Wijayati

Editor:
Andika Drajat Murdani

ISBN: 978-623-5859-54-5

Desain sampul: Roni Setyawan
Tata letak: Nabila

Penerbit:
UNISRI Press

Redaksi:
Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta
Press.unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

Cetakan Pertama, 2023

Copyright © 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Segala puji penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, serta salam dan sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi muhammad SAW. Rasa syukur mendalam penulis haturkan kepada Allah karena telah berhasil menyusun dan menerbitkan buku Sistem Ekonomi Indonesia ini yang diharapkan dapat menjadi bahan bacaan berharga dalam kegiatan belajar para mahasiswa di berbagai program studi di Indonesia, maupun pembaca umum yang hendak mempelajari ilmu ekonomi secara mendasar.

Perekonomian bagi suatu negara merupakan suatu kajian penting dan selalu menjadi pembahasan menarik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Indonesia sendiri telah mengalami banyak dinamika sepanjang sejarah perjalanan perekonomiannya, dan terus berlanjut hingga kini. Kegiatan ekonomi terus berkembang secara fleksibel mengikuti berbagai tantangan dan perkembangan zaman. Materi ini menjadi penting untuk dipahami oleh para mahasiswa atau pelajar yang hendak mendalami lebih lanjut tentang dinamika ataupun fenomena perekonomian yang berlangsung di Indonesia secara kompleks dan mendalam.

Semoga buku ini menghadirkan banyak manfaat. Meski penulis yakin banyak terdapat keterbatasan di sana sini, semoga dapat diterima dengan baik dan tetap tidak membatasi kebermanfaatan ilmu yang disebarkan melalui buku ini.

Surakarta, Januari 2023

Penulis

Daftar Isi

Prakata iii

Daftar Isi iv

Bab 1 Sejarah Perekonomian Indonesia 1

A. Tujuan Pembelajaran 2

B. Uraian Materi 2

1. Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama 4
2. Ekonomi Inonesia Era Orde Baru 12
3. Ekonomi Indonesia masa Pemerintahan Transisi 20

C. Pendalaman Materi 23

Bab II Landasan Ekonomi Indonesia 24

A. Tujuan Pembelajaran 25

B. Uraian Materi 25

1. Ideologi dalam Sistem Ekonomi 25
2. Landasan Ekonomi Indonesia 27
3. Pancasila sebagai Nilai Dasar Sistem Ekonomi Indonesia 31

C. Pendalaman Materi 38

Bab III Karakteristik Sistem Ekonomi di Indonesia 39

A. Tujuan Pembelajaran 40

B. Uraian Materi 40

1. Pengertian Sistem Ekonomi 40
2. Karakteristik Ekonomi Indonesia 43
3. Asas Sistem Ekonomi Indonesia 44
4. Prinsip Penyelenggaraan Ekonomi Indonesia 47

C. Pendalaman Materi 50

Bab IV Aktor-Aktor Penggerak Ekonomi Indonesia 51

A. Tujuan Pembelajaran 52

B. Uraian Materi 52

1. Identifikasi Aktor Penggerak Ekonomi Indonesia52
2. UMKM dalam Pergerakan Ekonomi Indonesia ..54

C. Pendalaman Materi 61

Bab V Daya Saing Ekonomi bagi Industri Indonesia 62

A. Tujuan Pembelajaran 63

B. Uraian Materi 63

1. Potensi Daya Saing Global Ekonomi Indonesia . 63
2. Industri Padat Karya Indonesia 66
3. Industri Padat Modal Indonesia 71

C. Pendalaman Materi 75

Bab VI Struktur Sosial Budaya dalam ekonomi Indonesia 76

A. Tujuan Pembelajaran 77

B. Uraian Materi 77

1. Hakikat Struktur Sosial Budaya 77
2. Struktur Sosial Budaya dan Ekonomi 80

C. Pendalaman Materi 83

Bab VII Pembangunan Ekonomi dalam Otonomi Pedesaan di Indonesia 84

A. Tujuan Pembelajaran 85

B. Uraian Materi 85

1. Otonomi Daerah 85
2. Pembangunan Ekonomi Peedesaan 92

C. Pendalaman Materi 100

Daftar Pustaka 101

Profil Penulis 103

Bab 1

Sejarah Perekonomian Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1) Mahasiswa memahami sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia era orde lama
2) Mahasiswa memahami sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia era orde baru
3) Mahasiswa memahami sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia era transisi/ pasca reformasi

B. Uraian Materi

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, berbagai sistem ekonomi telah diterapkan. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, dengan kepemilikan alat produksi biasanya menentukan sistem ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat terjadi karena adanya sistem ekonomi yang mengatur segala kegiatan. Membangun sistem ekonomi tidaklah mudah dan karena itu tidak dapat dilakukan dalam sekejap mata. Proses ini membutuhkan kerja keras dan bertahap karena sistem ekonomi bukanlah konsep teknis yang digunakan untuk

memecahkan masalah pragmatis. Namun, sistem ekonomi adalah istilah teknis yang digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan ekonomi yang bertepatan dengan basis ideologis masyarakat.

Membangun sistem ekonomi membutuhkan proses dan rangkaian tahapan yang sangat panjang, sehingga dibutuhkan rangkaian tahapan dari awal hingga akhir hingga akhirnya terciptalah sistem ekonomi tersebut. Ekonomi masyarakat atau bangsa tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil pemikiran dan kerja keras setiap orang dalam suatu masyarakat atau bangsa dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia bagi mereka.

Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, sistem ekonomi selalu menjadi perbincangan hangat dan menarik dalam berbagai konteks. Diskusi ini biasanya diadakan untuk menemukan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 1980-an, pembahasannya sangat intens, melibatkan pakar dan pelaku dari berbagai kalangan. Akibatnya, beberapa interpretasi dari sistem ekonomi Indonesia telah ditawarkan. Sayangnya, pembahasan semacam itu mulai meredup sejak awal 1990-an, ketika posisi rezim Orde Baru sudah mapan dan

pengaruh sistem ekonomi liberal dalam perekonomian semakin kuat.

1. Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, bukan berarti Indonesia dapat benar-benar bebas dalam praktiknya dan memiliki kontrol penuh atas negaranya. Hingga tahun 1940-an, Indonesia mengalami dua perang besar dengan Belanda. Akibatnya, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk pada masa pemerintahan Orde Lama. Meskipun mengalami tingkat pertumbuhan tahunan majemuk hampir 7% pada 1950-an, setelah itu menurun tajam menjadi rata-rata tahunan hanya 1,9% atau bahkan mengalami stagflasi pada 1965-1966. Pada tahun 1965 pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,5% dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 1966 sebesar 0,6%. Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus sejak tahun 1958, terjadi defisit neraca pembayaran dan anggaran pengeluaran pendapatan pemerintah dari tahun ke tahun.

Pemerintah bahkan banyak membuat kebijakan yang dianggap kurang tepat sehingga membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Misalnya saja, seperti pencetakan uang rupiah yang terlalu banyak tanpa

landasan ekonomi kuat. Padahal, banyaknya rupiah yang dicetak pada era Sukarno bukan hanya karena pengelolaan uang yang buruk, tetapi juga karena kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua perang, yaitu penaklukan Irian Barat dan bentrokan dengan Malaysia dan Inggris Raya. Mendanai penumpasan pemberontakan ganda di beberapa wilayah Indonesia secara nasional.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Orde Lama disebabkan (terutama) oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, baik fisik maupun non fisik, pada masa pendudukan Jepang, Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan. seperti keresahan dalam negeri (termasuk beberapa pemberontakan di daerah) ditambah dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama ini." Dapat dipahami bahwa dalam situasi politik dan sosial dalam negeri seperti itu, sangat sulit bagi pemerintah untuk memutar roda pemerintahan dengan baik. .untuk mengatur ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Pada masa orde lama, strategi pembangunan didasarkan pada perencanaan pembangunan dengan lebih menekankan pada upaya pembangunan politik. Hal ini sesuai dengan situasi pada saat itu yaitu dalam masa perjuangan fisik untuk

mempertahankan kemerdekaan nasional, sehingga implementasi yang tepat tidak mungkin dilakukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Beberapa kebijakan ekonomi utama yang banyak menjadi sorotan dalam era orde lama, di antaranya:

a) Pembentukan Planning Board

Planing board atau (kantor perencanaan ekonomi) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947. Kantor ini didirikan atas usul Menteri Kesejahteraan AK. gan Lembaga ini merupakan badan tetap yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi 2-3 tahun, yang kemudian disepakati dalam rencana pembangunan sepuluh tahun.

Bangunan publik utama asing yang dinasionalisasi dengan ganti rugi dari perusahaan Jepang akan disita sebagai ganti rugi kepada RI. Bisnis asing lainnya dikembalikan ke pemiliknya yang sah setelah berakhirnya perjanjian Republik Indonesia-Belanda. Badan ini berupaya menasionalisasikan semua industri yang ada dengan mengubahnya menjadi badan hukum.

Hal ini dengan harapan Indonesia dapat memanfaatkan semua industri dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk rencana pembangunan ini

terbuka untuk investor dalam negeri dan asing. Inti dari rencana ini adalah Indonesia membuka diri terhadap investasi asing dan memberikan kredit baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi, pemerintah membuka diri terhadap investasi asing, memobilisasi dana publik melalui obligasi pemerintah, tabungan publik, dan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, sebuah bank pembangunan dibuat.

Usaha patungan (merger) diperbolehkan ketika tanah pribadi dihapuskan. Perkembangannya Pada bulan April 1947, badan ini diperluas menjadi Komite Pemikiran Strategi Ekonomi, yang bertugas untuk meneliti, mengumpulkan informasi dan memberi nasihat kepada pemerintah tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan negosiasi dengan Belanda.

Rencana itu tidak diterapkan dengan benar, mis. sebagian besar yang tersisa, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. tergolong daerah miskin dan padat penduduk (Sumatra dan Jawa). Hal ini ditambah dengan Pemberontakan PKI dan Agresi Militer Belanda II, menyebabkan kesulitan ekonomi yang semakin meningkat.

b) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA)

Tujuan dari program yang diselenggarakan pada tahun 1948 ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk meringankan perekonomian negara. Rasionalisasi melibatkan peningkatan administrasi publik, angkatan bersenjata, dan mesin ekonomi.

Jumlah pasukan pertahanan dikurangi secara drastis untuk membebaskan dana pemerintah dan meningkatkan efektivitas pasukan pertahanan dengan menyusupkan mantan tentara ke tempat-tempat produksi yang dikelola Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang dikemukakan Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penaburan benih yang lebih baik dan perluasan peternakan.

c) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disiapkan oleh Menteri Pangan I.J. Kasimo. Program ini berbentuk rencana produksi swasembada pangan selama tiga tahun (1948-1950) dengan beberapa petunjuk pelaksanaan praktis. Inti dari rencana Kasimo adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan produksi pangan. Rencana Kasimo adalah:

Kami akan menanam lahan kosong (belum digarap) di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar, meningkatkan efisiensi di Jawa dengan menanam benih unggul yang mencegah penyembelihan hewan penting untuk produksi pangan. Taman kanak-kanak didirikan di setiap desa. Pekerjaan perencanaan yang lebih ekstensif dimulai pada tahun 1952, yang intinya, bagaimanapun, masih merupakan sektor publik. Rencana pembangunan lima tahun berhasil disusun pada tahun 1956-1960. Masa jabatan pemerintahan pada periode Liberal sangat singkat dan program berturut-turut menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan resesi ekonomi, inflasi, dan pembangunan yang lambat. Program yang dilaksanakan kebanyakan merupakan program jangka pendek, namun pada masa pemerintahan Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk badan perencanaan pembangunan yang disebut Badan Perancang Negara.

Dinas ini mempunyai tugas merencanakan pembangunan jangka panjang. Orang Irlandia Juanda diangkat menjadi Menteri Perencanaan. Kantor ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) untuk dilaksanakan antara tahun 1956 dan 1961, yang disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958.

Pada tahun 1957, tujuan dan prioritas RPLT diubah pada Musyawarah Pembangunan Nasional. . telur). Pendanaan RPLT diperkirakan sebesar Rp 12,5 miliar.

d) Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana

Rencana pembangunan nasional yang direncanakan berhasil disusun pada tahun 1961-1969. Pada sidang paripurna kelima tanggal 3 Desember 1960, sidang Bandung pertama, setelah pembahasan dari hasil kerja Departemen Pendidikan, "Daftar Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Universal Rencana Delapan Tahun 1961-1969" dan meninjaunya berdasarkan Amanat Pembangunan yang dikeluarkan oleh Presiden pada 28 Arah Pembangunan. Adapun pertimbangan yang ditetapkan pada saat tersebut:

i. bahwa pedoman model pembangunan dan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya harus segera ditetapkan.
ii. Menimbang bahwa pembangunan nasional terencana sejagat adalah pembangunan transisi yang bersifat menyeluruh untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia yang tidak menindas atau

mengeksploitasi rakyat, memenuhi tatanan penderitaan . dari orang-orang

iii. Menimbang bahwa Rencana Umum Pembangunan Nasional delapan tahun 1961-1969 merupakan tahap pertama pembangunan yang bersifat nasional, universal, terencana dan bersifat tripartit, yang meletakkan dasar bagi pembangunan mental dan fisik yang sehat dan kuat serta pembangunan bangsa dan negara sistem ekonomi yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada penurunan pasar dunia.

iv. Syarat dasar pembangunan rohani yang sehat dan kuat antara lain, antara lain, memajukan kepribadian dan budaya Indonesia yang berlandaskan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong royong sesuai dengan Dasar Negara Pancasila, serta mengutamakan kesadaran moderasi dan kejujuran yang sesuai. dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

v. bahwa prasyarat utama bagi berkembangnya tatanan ekonomi nasional antara lain adalah pembebasan berjuta-juta petani dan penduduk pada umumnya dari pengaruh penjajahan. imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme, dengan melaksanakan "reforma agraria" menurut ketentuan hukum nasional Indonesia, sambil meletakkan dasar bagi industrialisasi, terutama industri-industri dasar dan berat, yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara;

2. Ekonomi Inonesia Era Orde Baru

Indonesia mulai memasuki babak baru dengan pemerintahan Orde Baru pada Maret 1966. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, perhatian pemerintah pada era Orde Baru lebih tertuju pada peningkatan kesejahteraan sosial rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah Orde Baru memulihkan hubungan baik dengan Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.

a) Pemerintahan Order Baru tetap menghadapi beragam kendala atau tantangan ekonomi yang berat, seperti kondisi:
b) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
c) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
d) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
e) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
f) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
g) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun.

Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dapat dibagi ke dalam tiga periode secara umum. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Periode-periode tersebut meliputi:

a) Pemulihan ekonomi
b) Pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat

c) Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi

Masa Pemulihan Ekonomi

Pada masa paling awal, atau tahap pemulihan ekonomi, Indonesia menghadapi berbagai kendala ekonomi yang berat akibat gejolak pemberontakan PKI dan hubungan internasional yang buruk. Pemerintahan Indonesia masa Orde Baru menentukan skala prioritas kebijakan ekonomi untuk diselesaikan terlebih dahulu secara bertahap. Adapun prioritas ekonomi yang ditetapkan di awal pemerintahan, berupa:

a) Memerangi hiperinflasi.
b) Mencukupkan persediaan pangan (beras).
c) merehabilitasi prasaran perekonomian.
d) Peningkatan ekspor.
e) Penyediaan lapangan kerja.
f) Mengundang investor asing.

Dalam jangka pendek, pemerintah Order Baru menetapkan beberapa kebijakan bertahap, berikut:

a) Juli – Desember 1966: untuk program pemulihan .
b) Januari – Juni 1967: untuk tahap rehabilitasi.

c) Juli – Desember 1967: untuk tahap konsolidasi.
d) Januari – Juni 1968: untuk tahap stabilisasi

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah berikut:

a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (*balanced budget policy*).
b) Pembentukan IGGI.
c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
   - ✓ UU tahun 1967 tentang Perbankan
   - ✓ UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
   - ✓ UU tahun 1968 tentang Bank Asing.
d) Menjadi anggota kembali IMF.
e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai "'agen pembangunan".

Pertumbuhan Ekonomi Secara Cepat

Setelah berhasil mengatasi permasalahan krusial yang paling penting dalam tahapan ekonomi awal masa Orde Baru di Indonesia, pemerintah melanjutkan rancangan kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi berikutnya dirancang untuk memperkuat stabilitas

ekonomi dan mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih berkesinambungan. Beberapa skala prioritas kebijakan ekonomi selanjutnya menekankan pada permasalahan yang masih dianggap penting untuk diselesaikan segera, berupa:

a) Pengendalian inflasi.
b) Pencukupan kebutuhan pangan
c) Rehabilitasi prasarana ekonomi
d) Peningkatan kegiatan ekspor
e) Pencukupan kebutuhan sandang

Pemerintah membagi rencana pencapaian priorotas ekonomi dalam rencana fisik dan rencana moneter. Adapun rencana fisik dengan sasaran utama :

a) Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)
b) Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

Sedangkan rencana moneter, ditargetkan dengan sasaran utama berupa:

a) Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik.

b) Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

Pertumbuhan Didorong Ekspor dan Deregulasi

Selanjutnya, salah satu kebijakan yang cukup populer di masa Order Baru adalah adanya kebijakan **REPELITA**. Untuk mencapai jalur pemerataan pembangunan, Soeharto mengembangkan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Praktek ini berlanjut enam kali sebelum Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah unit perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun Soeharto. Program ini mengimplementasikan sentralisasi perkembangan ekonomi makro Indonesia saat ini. Rancangan program Repelita dipimpin oleh Widjojo Nitisastro pada tahun 1967 ketika menjabat sebagai Direktur Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), yang disempurnakan selama kurang lebih satu tahun. Selain Nitisastro, program ini juga dirangkai dengan para teknokrat lain yang juga berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yaitu Emil Salimin, Ali Wardhana,

J.B. Sumarlin, Saleh Afff, Subroto, dan Mohammad Sadli. Repelita I mulai tanggal 1 April 1969 setelah pengesahan UU APBN tahun anggaran 1969/1970 pada tanggal 31 Maret 1969.

Berikutnya, berikut adalah tahapan program Repelita yang diselenggarakan pada masa Order Baru:

a) Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
b) Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
c) Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
d) Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
e) Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
f) Repelita VI (1994–tidak selesai) bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi

asing dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional.

Pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru menunjukkan perkembangan yang positif. Tabel berikut ini menunjukkn bagaimana pertumbuhan PDB Indonesia masa Orde Baru:

Tahun	PDB (triliun)*		Laju Pertembuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1969	2,7	4,8		
1970	3,2	5,2	19,1	7,5
1971	3,7	5,6	13,4	7,0
1972	4,6	6,1	24,3	9,4
1973	6,8	6,8	48,0	11,3
1974	10,7	7,3	58,6	7,6
1975	12,6	7,6	18,1	5,0
1976	15,5	8,2	22,3	6,9
1977	19,0	8,9	23,1	8,9
1978	22,8	9,6	19,5	7,7
1979	32,0	10,2	40,8	6,3
1980	45,5	11,2	41,9	9,9
1981	54,0	12,1	18,9	7,9

1982	59,6	12,3	10,4	2,2
1983	77,6	12,8/77,6**	30,2	4,2
1984	88,9	83,0	15,8	7,0
1985	97,0	85,1	7,9	2,5
1986	102,7	90,1	5,9	5,9
1987	124,8	94,5	21,6	4,9
1988	142,0	99,9	13,8	5,8
1989	162,6	104,5	14,5	7,5
1990	188,5	112,4	15,9	7,2
Keterangan :				
* = angka dibulatkan;				
** = dan tahun-tahun setelah itu atas dasar harga 1983 (sebelumnya atas dasar harga (1973)				

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 1991/1992

3. Ekonomi Indonesia masa Pemerintahan Transisi

Masa pemerintahan transisi adalah sebutan bagi masa yang berlangsung setelah pemerintahan Soeharto, yang digantikan oleh B.J Habibie. Pada masa tersebut, Indonesia mengalami guncangan ekonomi politik yang cukup kuat akibat adanya reformasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah reformasi kebijakan di berbagai sektor guna mengembalikan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Masa ini juga dikenal sebagai masa reformasi. Perekonomian Indonesia pasca reformasi diawali dengan krisis mata

uang/devaluasi rupiah pada paruh kedua tahun 1997 pada masa pemerintahan reformasi.

Pada saat itu kinerja perekonomian Indonesia merosot tajam dan menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai sektor. Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Presiden saat itu, harus menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 20 Mei 1998, dan memiliki banyak pekerjaan rumah di depannya. Situasi ekonomi yang memburuk yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa langkah penting. Di bidang moneter, mulai dari pengendalian peredaran uang, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70 persen, dan pembentukan bank sentral yang mandiri. Di sektor perbankan, Rp. Obligasi senilai 650 triliun untuk menyelamatkan bank, menutup 38 bank, dan mengambil alih tujuh bank. Di bidang pajak, beberapa proyek infrastruktur, perlakuan khusus mobil nasional, dan pembiayaan program jaring pengaman sosial dihentikan sementara. Pada saat yang sama, di sektor korporasi, dengan bantuan program Badan Penyehatan Utang Indonesia - *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA)

dan Prakarsa Jakarta, utang swasta direstrukturisasi dan praktik monopoli Bulog dan Pertamina diakhiri.

Di tengah gejolak situasi politik, hukum, dan keamanan saat itu, pemerintah harus mengambil keputusan cepat, meski mengandung risiko besar. Ternyata, langkah cepat yang diambil pemerintah saat itu membuahkan hasil. Setahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu membawa beberapa dampak, antara lain penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp 7.000 - 17.000. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampaknya. membaik menjadi 2 persen dari sebelumnya -13 persen, inflasi berhasil diredam dari 77,6 persen menjadi 2 persen.

Pmerintahan pasca reformasi terus mengalami perkembangan di berbagai aspek. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun pasca reformasi berdasarkan beberapa indikator yang ada:

Indikator	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Pertumbuhan PDB rill (%)	-13,1	0,8	0,9	3,8	4,3	4,9	5,1	5,7	5,5	6,3	6
PDB nominal (miliar US$)	96	140	166	164	200	239	258	287	364	433	497
PDB per kapita (US$)	977	694	742	697	948	1117	1191	1308	1641	1925	2183
Pertumbuhan ekspor (%)	-8,6	-0,4	27,7	-9,3	5	8,4	12	19,7	17,7	13,2	7
Pertumbuhan impor (%)	-34,4	-12,2	39,6	-7,6	15,1	10,9	27,8	24	5,8	22	12
Neraca Perdagangan (miliar US$)	21,5	24,7	28,6	25,4	23,5	24,6	21,2	28	39,7	39,6	39,1
Transaksi berjalan (% PDB)	4,3	4,1	4,8	4,2	3,9	3,9	1,1	0,1	3	2,5	1,6

Sumber: bps.go.id

C. Pendalaman Materi

Sejarah perekonomian Indonesia diwarnai dengan berbagai dinamika dan tantangan. Ada banyak permasalahan yang muncul pada berbagai era dengan karakteristiknya tersendiri. Jelaskan bagaimana perbedaan karakter perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Transisi Pasca Reformasi!

Bab II

Landasan Ekonomi Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1) Mahasiswa memahami kaitan ideologi dan sistem ekonomi
2) Mahasiswa mampu mengidentifikasi landasan ekonomi di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Ideologi dalam Sistem Ekonomi

Ideologi adalah kumpulan gagasan yang dianut oleh kelompok tertentu yang menggambarkan kondisi sosial tertentu dan membentuk nilai dasar dan tujuan yang diperjuangkan atau dibudayakan. Ideologi muncul dari adanya sejarah kelompok tertentu, dalam sebuah ide yang lahir sebagai akibat dari keadaan dan kebutuhan. Fondasi ideologis dibangun di atas nilai-nilai ideologis dan dibangun di atas sistem ekonomi. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi dasar bagi seluruh bagian sistem ekonomi, tanpa landasan ideologi sistem ekonomi kehilangan identitasnya bahkan dapat menjadi pedoman teknis dan teoretis. Pada dasarnya basis ideologi tersebut dapat membedakan suatu sistem ekonomi satu wilayah dengan wilayah lainnya, misalnya sistem ekonomi

kapitalisme dan sosialisme yang menggunakan prinsip dan ideologi yang berbeda, memungkinkan urgensi posisi landasan/nilai ideologi. diperlukan.)

Karena kedudukan nilai-nilai ideologis yang menjadi dasar dan landasan sistem ekonomi, maka nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan, baik sosial maupun politik. Itulah sebabnya nilai-nilai ideologis dasar sering disebut sebagai cara hidup, meskipun bisnis, politik, dan masyarakat memiliki dunianya sendiri dan praktik yang berbeda, mereka tetap merujuk pada pandangan hidup yang sama. Misalnya, dalam bidang ekonomi, ideologi individualisme adalah persaingan bebas, dalam bidang politik, demokrasi dipraktikkan, dan dalam bidang sosial, di mana individu egois. Adanya kompetisi, demokrasi dan egoisme adalah praktik kehidupan, tetapi berasal dari satu ideologi yang sama, yaitu ideologi individualistis.

Sistem ekonomi adalah pedoman yang lengkap dan menyeluruh untuk mengatur perekonomian suatu kelompok, bangsa, masyarakat, negara, bahkan kelompok negara tertentu. Meliputi ideologi, nilai, filosofi dan keyakinan orang yang bersangkutan, baik itu negara, bangsa, masyarakat atau kelompok individu. Sistem ekonomi dibangun di atas nilai-nilai dasar kehidupan,

kemanusiaan dan masyarakat. Sistem ekonomi bersifat spesifik dan tidak universal, validitasnya dibatasi oleh nilai-nilai bersama para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perbedaan nilai yang diterima menimbulkan perbedaan sistem dan ideologi yang dianut oleh pemangku kepentingan.

Misalnya, sistem ekonomi kapitalis dibangun di atas nilai-nilai individualisme, yang menurutnya individu memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu dengan keinginan dan tujuan yang terkait dengan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan akal dan kesempurnaan, sehingga harus diberi kebebasan untuk memenuhi keberadaannya untuk bekerja. Atas dasar ini, sistem ekonomi kapitalis menempatkan individu sebagai pelaku dan pemegang otoritas tertinggi dari sistem ekonomi.

2. Landasan Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi suatu negara harus spesifik dan dapat merespon cara hidup bangsa sesuai pandangan atau karakter bangsa. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai ras, golongan, suku,

adat istiadat, budaya dan agama maka dari itu Indonesia juga memiliki bahasa yang berkaitan dengan aturan budaya masing-masing suku. Walaupun pada hakekatnya Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dengan keragamannya, meskipun mengalami disintegrasi dan gejolak sosial. Untuk itu perlu diketahui nilai-nilai ideologis yang akan dipegang dan digunakan untuk mengatasi disintegrasi dan gejolak sosial yang terjadi.

Terdapat dua konsep dapat digunakan untuk memahami dinamika kehidupan sosial di Indonesia, yaitu fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Menurut pendekatan fungsional-struktural, sistem sosial suatu masyarakat pada dasarnya harmonis atau seimbang. Alasannya adalah bahwa sistem sosial merupakan integrasi dari berbagai bagian sistem yang saling terkait satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip dasar yang dianut sebagian besar masyarakat. Menurut pendekatan konflik, pembangunan sosial muncul dari unsur-unsur kontradiktif yang timbul dari pembagian kekuasaan atau wewenang yang tidak seimbang. Ketimpangan distribusi kekuasaan ini menimbulkan perbedaan atau bahkan konflik kepentingan dan kompensasi, sehingga konflik tidak dapat dihindari.

Pancasila adalah dasar negara atau ideologi negara Indonesia, yang berisi seperangkat nilai kehidupan. Akibatnya, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terbukti Indonesia mampu mengatasi ancaman disintegrasi dan kerusuhan sosial yang terus menerus tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus memiliki nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila, nilai-nilai tersebut menjadi pedoman pembentukan komponen-komponen sistem dan rambu-rambu bagi terwujudnya kehidupan ekonominya.

Pancasila, sebagai visi dan falsafah bangsa Indonesia, memainkan dua peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah kebusukan dan keresahan sosial. Yang pertama adalah mempersatukan kemajemukan Indonesia dalam arti toleransi yang berarti bangsa

Meski berbeda latar belakang, Indonesia harus hidup damai berdampingan. Kedua Pancasila menghayati kehidupan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dalam bidang politik, sosial, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan yang perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedua peran tersebut merupakan kunci terpenting untuk menjaga persatuan

dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia harus menempatkan ideologi Pancasila dalam berpikir dan bertindak atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila harus dapat menjadi landasan kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila memiliki ciri atau perbedaan mendasar dibandingkan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila bukanlah ideologi liberal dan bukan ideologi komunis. Menurut Soekarno, ideologi Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup sejak dahulu kala.

Pancasila sebagai ideologi menjadi sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial di Indonesia, ideologi pancasila adalah doktrin atau doktrin cita-cita bangsa Indonesia, yang kebenarannya diyakini oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai ideologi. Pancasila adalah bintang penuntun kebijakan reformasi hukum Indonesia. Kebijakan reformasi yang tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan hukum yaitu. Pancasila dapat dikatakan masih bias karena tidak melihat sisi pembangunan hukum nasional sebagai bagian

integral yang seharusnya masuk dalam pembahasan Pancasila sebagai bintang penuntun (*leitztern*).

3. Pancasila sebagai Nilai Dasar Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia harus memiliki nilai (sila) yang berlandaskan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara, yang memiliki nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Hubungan ini berfungsi sebagai rambu-rambu dalam desain semua komponen (subsistem) dan sebagai rambu-rambu dalam kontrol sistem ekonomi.

Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan memiliki hubungan yang penting dengan tatanan organisasi kegiatan ekonomi, yang paling penting dari kegiatan ekonomi adalah bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan sifat-sifat Tuhan seperti kejujuran dan keadilan. Keterkaitan keduanya juga dapat diperluas, yaitu harus ada peluang yang baik untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran agama di Indonesia. Praktik ekonomi syariah yang didukung oleh lembaga ekonomi Islam dan praktik lain yang bersumber dari ajaran agama dan kearifan lokal lainnya harus diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi Indonesia. Nilai

ketuhanan juga memiliki implikasi penting bagi kepemilikan. Alam dan kekayaan yang dikandungnya adalah ciptaan Tuhan, jadi kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Dengan demikian, kepemilikan alam, meskipun diatur dengan sistem properti, menjadi milik bersama (komunal), bukan milik individu. Ini tidak berarti bahwa properti individu tidak diakui. Instruksi Ilahi juga memiliki konsekuensi penting dalam hal tujuan yang dapat dicapai.

Orang yang beragama memiliki tujuan keuangan, yang tidak hanya mencari kekayaan di dunia ini tetapi juga kemuliaan di akhirat. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya, tetangga dan masyarakat lainnya. Perintah Tuhan juga sangat penting dalam pengelolaan ekonomi, karena kegiatan ekonomi harus sesuai dengan sifat Tuhan yaitu kejujuran dan keadilan. Seperti yang telah kita ketahui, kegiatan ekonomi melibatkan banyak pelaku ekonomi yang seringkali tidak kita ketahui, contohnya di pasar. Pasar harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keadilan, hanya pasar yang adil yang dapat menjamin pemain bertindak jujur. Demikian pula, pemerintah harus mengatur sistem ekonomi secara adil dan jujur, serta tidak berpihak pada salah satu pihak.

Keterkaitan antara perintah ketuhanan dengan kegiatan ekonomi tidak terbatas pada keadilan dan kejujuran, tetapi dapat diperluas, misalnya dengan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran agama. Indonesia juga berpeluang menerapkan sistem ekonomi berdasarkan ajaran agama. Pada dasarnya, alam dan kekayaannya adalah milik Tuhan. Manusia hanya diberi wewenang untuk mengendalikannya. Dalam sistem real estat, kepemilikan alam adalah kepemilikan bersama, bukan kepemilikan pribadi. Untuk struktur kepemilikan bersama, itu dipegang oleh pemerintah berdasarkan Pasal 33(3) UUD 1945.

Nilai Kemanusiaan

Pedoman lain yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia adalah nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk berakal, makhluk yang bebas dan mandiri, makhluk yang sederajat di hadapan Tuhan, dan makhluk yang berkomunikasi (sosial). Sistem ekonomi Indonesia harus dibangun dan dikelola atas dasar kemanusiaan ini. Menurut prinsip kemandirian, seseorang dapat memilih kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginannya sendiri. Selain itu, masyarakat Indonesia bebas untuk mengerahkan seluruh potensinya dalam

kegiatan ekonomi selama kegiatan tersebut tidak merugikan kepentingan orang lain.

Sistem ekonomi Indonesia harus berorientasi pada manusia, yaitu sistem ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Perintah-perintah kemanusiaan juga memiliki implikasi penting bagi harta benda. Harta pribadi itu berasal dari kerja kerasnya di bidang keuangan. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi memiliki tanggung jawab sosial, karena properti diperoleh dengan bantuan orang lain.

Sistem ekonomi Indonesia harus memeringkatkan manusia menurut kualifikasi manusianya. Sesuai dengan derajat kemanusiaan berarti orang harus berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan faktor produksi modal dan lainnya. Setiap orang bebas memilih kegiatan ekonomi apapun menurut kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain.

Rakyat merupakan tujuan utama sistem ekonomi Indonesia karena tujuan utama sistem ekonomi Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan bukan hanya pemenuhan sandang, pangan dan papan, tetapi juga pemenuhan rasa aman bagi jiwa, ruh, dan lain-lain. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi tentu membutuhkan bantuan pelaku ekonomi lain untuk

mencapai tujuannya, yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam semangat kerja sama yang saling menguntungkan.

Nilai Persatuan

Indonesia memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, budaya dan ras. Oleh karena itu, sistem perekonomian Indonesia harus dibangun atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, beberapa hal harus diperhatikan, yaitu:

a) Pengelolaan keuangan harus melibatkan setiap orang dalam kegiatan ekonomi.
b) Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan kata lain, tidak ada dominasi satu sektor atas yang lain, tidak ada dominasi satu daerah atas yang lain, dsb.
c) Kegiatan ekonomi berlangsung merata di semua sektor, wilayah, dan strata ekonomi.
d) Pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan harus dibagi rata dan adil di antara para pelaku ekonomi dan tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, sesuai dengan nilai persatuan, kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan pelaku ekonomi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Prinsip persatuan memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nilai persatuan menuntut agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi dilandasi semangat kebersamaan yang tercermin dari tingginya partisipasi dalam kegiatan ekonomi dari semua lapisan masyarakat, berbagi sumber daya dan kegiatan ekonomi di luar negeri, dan dalam semangat yang baik. nasionalisme dan kemandirian ekonomi nasional.

Nilai Kerakyatan

Perwujudan dari demokrasi kerakyatan adalah pelestarian demokrasi ekonomi. Yaitu, bentuk sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi. Inti dari ekonomi berdaulat adalah kegiatan ekonomi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Oleh rakyat berarti penyelenggaraan perekonomian nasional dilaksanakan setelah mendapat mandat dari rakyat. Dengan rakyat berarti rakyat mengelola perekonomian. Dan bagi orang-orang ini berarti tujuan pengorganisasian ekonomi adalah untuk menciptakan kekayaan bagi semua orang. Jadi yang

dimaksud dengan rakyat adalah semua warga negara, bukan perseorangan.

Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat. Tujuan pembenaran hak rakyat atas penentuan nasib sendiri adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari rakyat, melalui rakyat dan untuk rakyat. Dari sudut pandang rakyat, ini berarti kegiatan ekonomi dapat dilakukan setelah mendapat amanah dari rakyat. Rakyat adalah pihak yang paling efektif untuk menciptakan tatanan ekonomi melalui wakil-wakilnya. Oleh rakyat, artinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh rakyat itu sendiri.

Nilai Keadilan

Bagi rakyat, tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk menciptakan keadilan yang merujuk pada kedaulatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tak kecuali, tanpa membedakan. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah semua warga negara, bukan hanya individu. Demokrasi ekonomi didasarkan pada kohesi, yang tujuannya adalah kebaikan bersama, bukan pada individualisme atau semangat persaingan bebas antar individu.

Demokrasi ekonomi Indonesia memang unik. Negara menguasai sektor-sektor strategis tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh. Kesejahteraan fakir miskin atau terlantar yang tidak dapat diurus oleh negara adalah tanggung jawab negara. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama. Kondisi inilah yang disebut nilai keadilan. Hanya saja, adil bukan berarti sama. Adanya pembagian kerja di antara mereka adalah hal sah, karena keahlian masing-masing pelaku ekonomi berbeda. Negara dan pemerintah mengelola aset strategis, sedangkan swasta dan koperasi dapat mengelola sektor atau aset yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Tentu saja, muara dari berbagai kegiatan ini adalah pencapaian kesejahteraan secara bersama dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pendalaman Materi

Ideologi suatu negara memiliki pengaruh besar terhadap sistem ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, landasan ekonomi disusun dengan memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia, sekaligus ideologi bangsa. Jelaskan seperti apa implementasi sistem ekonomi Indonesia, yang didasarkan pada ideologi bangsa!

Bab III

Karakteristik Sistem Ekonomi di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1) Mahasiswa memahami karaktersik sistem ekonomi Indonesia
2) Mahasiswa memahami asas sistem ekonomi Indonesia
3) Mahasiswa memahami prinsip penyelenggaraan ekonomi Indonesia

B. Uraian Materi

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Mempelajari sistem ekonomi tentu harus terlebih dahulu memahami pengertian sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Ada banyak pendapat tentang apa sebenarnya arti sistem ekonomi. Sheridan (1998) dalam publikasinya menjelaskan tentang sistem ekonomi bahwa "*Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happines*".

Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara orang-orang dan lembaga-lembaga dalam tatanan

kehidupan. Sistem ekonomi terdiri dari unsur manusia sebagai subyek; investasi keuangan menjadi obyek; dan seperangkat lembaga yang mengatur dan menghubungkan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya kelembagaan meliputi lembaga ekonomi (formal dan informal); metode kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan keuangan; dan aturan dan standar lainnya (tertulis atau tidak tertulis); dipilih dan diterima atau ditentukan oleh masyarakat di mana tatanan kehidupan ini berlangsung. Oleh karena itu perangkat kelembagaan ini meliputi kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; karena mereka berlaku untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem ekonomi dapat memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Menjalankan Perekonomian Nasional

Pelaku ekonomi dengan kepentingan online selalu terlibat dalam kegiatan ekonomi di tanah air. Meskipun jumlahnya sangat besar, namun hanya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu rumah tangga, korporasi dan pemerintah. Sedangkan pemerintah melalui lembaga sebagai konsumen melakukan kegiatan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh korporasi. Di sisi lain, pemerintah juga menyediakan barang atau jasa yang

dibutuhkan dalam perekonomian, seperti jalan, jembatan, keamanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, negara dapat bertindak baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen.

Ekonomi tenaga kerja tidak hanya digerakkan oleh aktor domestik. Pelaku ekonomi asing juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian nasional. Pelaku ekonomi dalam negeri membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku asing. Di sisi lain, pelaku ekonomi asing membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, tugas mendasar dari sistem ekonomi adalah untuk mendukung ekonomi nasional, yang melibatkan banyak aktor yang terhubung, dan membimbingnya menuju realisasi tujuan nasional.

2. Mengkoordinasikan Kegiatan Ekonomi

Dalam aturan ekonomi umum, sumber daya yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang dapat direalisasikan. Tujuan penting adalah bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan cara terbaik. Selain itu, alokasi sumber daya harus diselaraskan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi memerlukan koordinasi untuk menghindari ketidakseimbangan antara kebutuhan

dan ketersediaan sumber daya baik sektoral/regional maupun keseluruhan/nasional dan antara kelas bawah dengan kelas menengah dan kelas atas, serta keseimbangan saat ini dan keseimbangan masa depan. Koordinasi juga diperlukan untuk merekonsiliasi prinsip efisiensi dan pemerataan.

Efisiensi sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada saat yang sama, prinsip pemerataan diperlukan untuk menjamin pemerataan pendapatan. Kesetaraan dan efisiensi tidak selalu bertentangan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara lain. Itu semua tergantung pada kualitas koordinasi yang dilakukan.

2. Karakteristik Ekonomi Indonesia

Setiap negara memiliki karakeristiknya tersendiri, yang seringkali karakteristik ini mempengaruhi bagaimana perekonomian negara tersebut berlangsung. Perbedaan karateristik ekonomi ini dapat terjadi karena tiap negara memiliki banyak perbedaan, seperti dalam hal kebudayaan, kondisi ekonomi, serta struktur sosial dan politiknya. Karakteristik umum suatu negara biasanya ditetapkan berdasarkan indikator ekonomi dan sosial yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran

kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, karakteristik yang melekat pada perekonomian Indonesia adalah:

1) Negara kepulauan (*archiplegic state*).
2) Menghadapi persoalan kependudukan,
3) Menghadapi masalah kekurangan dan ketergantungan kapital pada negara lain,
4) Industrialisasi yang relatif lamban dan menghadapi masalah konsentrasi industri yang tinggi,
5) Menghadapi persoalan dualisme perekonomian, dan
6) Menerapkan sistem ekonomi campuran.
7) Berikut ini disajikan uraian singkat dari beberapa karakteristik umum perekonomian Indonesia.

3. Asas Sistem Ekonomi Indonesia

Indonesia adalah negara multietnis dengan tidak hanya satu jenis suku yang hidup di negaranya. Indonesia memiliki ratusan suku yang menjadikannya negara yang beragam. Pluralisme yang dimiliki Indonesia ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Karena

kebersamaan dan kekeluargaan mempersatukan keragaman suku, adat dan budaya Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Kebersamaan melahirkan sikap menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kemudian menolak keegoisan masyarakat. Kemudian mereka mengacu pada Pasal 33(1) UUD 1945 yang berbunyi: "Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas perhubungan". Dalam pasal ini menjadi jelas bahwa asas sistem ekonomi Indonesia selanjutnya adalah kekerabatan. Dalam hubungan kekerabatan ini, kepentingan dan kesejahteraan bersama ditetapkan dan harus didahulukan. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat Indonesia akan benar-benar merasakan kesatuan dan persatuan, sehingga perekonomian Indonesia berjalan dengan lancar dan tidak muncul kapitalisme di tengah-tengah kegiatan ekonomi rakyat.

Seluruh perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Prinsip keterhubungan menjadi sifat gotong royong dan rasa senasib sepenanggungan dalam beberapa aspek kehidupan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, penyelenggaraan kehidupan ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan (Rahardjo dan Herdianto WK., 2001). Hubungan antar anggota keluarga tidak didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi pada kasih sayang yang dihasilkan dari hubungan keluarga.

Bentuk fungsional kekerabatan dalam kehidupan nyata setidaknya tercermin dalam tiga hal:

a) Kepentingan dan kesejahteraan bersama harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan individu.
b) Ada persatuan dan kesatuan dalam pengertian itu antara pemimpin yang berkuasa dan anggota masyarakat yang dipimpin, dan pekerjaan melakukan segalanya untuk semua orang dan untuk semua orang.
c) Dalam segala upaya dan tindakan, cinta dan kewajiban adalah dorongan dan kekuatan pendorong, bukan hak dan keinginan klaim yang dominan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi bangsa dan negara Indonesia bermula dari kesadaran dan tekad kolektif yang kuat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun wilayah

Indonesia sangat luas dan tersebar serta terdapat keragaman budaya dan agama.

4. Prinsip Penyelenggaraan Ekonomi Indonesia

Prinsip-prinsip organisasi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas keterpaduan dan kekeluargaan. Hal itu tidak lain adalah terwujudnya tujuan sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan yang berlandaskan keadilan sosial. Sesuai dengan tujuan tersebut, Indonesia memiliki asas keadilan dan kemanfaatan dalam menyelenggarakan sistem perekonomian.

Prinsip keadilan peka terhadap realisasi hak. Jumlah hak harus proporsional atau sesuai. Artinya, hak yang diperoleh harus didasarkan pada apa yang dikorbankan atau diperoleh, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat nantinya. Karena apa yang mereka dapatkan tergantung pada apa yang mereka wakili atau apa yang mereka lakukan. Ketika asas keadilan saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial, muncul asas lain, yaitu kemanfaatan. Dengan asas kegunaan ini, maka diharapkan kegiatan ekonomi tidak hanya berdampak pada satu pihak saja,

tetapi semua orang bahkan seluruh alam semesta akan memperoleh manfaat darinya. Artinya, jika kegiatan ekonomi tidak membawa manfaat secara luas, maka lebih baik dihentikan saja. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan sistem perekonomian Indonesia.

Sistem ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi dapat mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan budaya dari UUD 1945 dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini tidak hanya memberikan pedoman tentang struktur ekonomi dan kekuasaan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi lebih mencerminkan suatu cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh dan terus diperjuangkan oleh para pemimpin pemerintahan. Pesan konstitusionalnya tampak jelas bahwa tujuannya adalah tatanan ekonomi tertentu yang tidak kapitalis (berdasarkan individualisme) tetapi berlandaskan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) merupakan arah kebijakan ekonomi unggulan yang menjadi landasan dalam menentukan pembangunan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang

kebijakan ekonominya lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat daripada kesejahteraan individu. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi pembangunan ekonomi bersifat merata, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud dalam pembangunan ekonomi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut asas kekeluargaan;
b) Industri-industri yang penting bagi negara dan pada umumnya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
c) Tanah dan air serta sumber daya alam yang dikandungnya berada di bawah kendali pemerintah dan digunakan untuk memaksimalkan kemakmuran manusia.

Jika dicermati Pasal 33 (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, terdapat filosofi ekonomi yaitu asas kekeluargaan. Filosofi keluarga adalah filosofi sosial yang menentang individualisme dan "kolektivisme" radikal

sosialisme. Pasal 33 UUD 1945 berperan membentuk hukum ekonomi sebagai landasan perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 yang menganut asas keterpaduan dan asas kekeluargaan harus menggantikan sistem ekonomi yang lebih awal (Hindia Belanda) yang menganut asas perseorangan (individualisme), karena kondisi ini merupakan sumber tertinggi dari hukum. dalam legislasi ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar demokrasi ekonomi dan juga sumber hukum tertinggi di bidang ekonomi, karenanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ekonomi.

C. Pendalaman Materi

Sistem ekonomi Indonesia berlangsung dengan mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia yang khas dan didasarkan pada asas ekonomi khusus. Hal ini kemudian dituangkan dalam perundang-undangan untuk dijadikan landasan dalam mengelola kehidupan ekonomi bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi. Jelaskan bagaimana wujud demokrasi ekonomi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia!

Bab IV

Aktor-Aktor Penggerak Ekonomi Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1) Mahasiswa memahami aktor penggerak ekonomi Indonesia dan perannya
2) Mahasiswa mampu menganalisis kontribusi UMKM dalam ekonomi Indonesia

B. Uraian Materi

1. Identifikasi Aktor Penggerak Ekonomi Indonesia

Jika mengacu pada teori heliks, kekuatan ekonomi suatu negara dipicu oleh adanya beberapa kelompok aktor penggerak ekonomi. Di Indonesia, perekonomiannya dinilai juga didominasi oleh empat pelaku utama. Tercatat pelaku penggerak perekonomian Indonesia adalah:

a) masyarakat,
b) kaum intelektual,
c) dunia usaha dan
d) pemerintah.

Keempat pemain ini memainkan peran penting sebagai aktor penggerak utama perekonomian Indonesia,

mulai dari implementasi hingga pengambilan keputusan. Jika keempat pemain ini bersinergi dengan baik, perekonomian Indonesia juga akan berkembang dengan baik. Kelembagaan yang efektif diperlukan untuk memfasilitasi hubungan yang positif dan saling menguatkan di antara keempat aktor utama tersebut.

Namun demikian, di antara pelaku sektor riil yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, beberapa pelaku lainnya dapat disebut sebagai pelaku yang mengarahkan perekonomian Indonesia. Pelaku perekonomian Indonesia dapat berupa UMKM/Usaha UKM dan koperasi.

UMKM/UKM dan koperasi merupakan ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat pada tingkat paling dasar. Oleh karena itu, peran para pelaku ekonomi ini sangat penting. Padahal, kelangsungan hidup Indonesia sebelum krisis keuangan global tahun 2008 tidak lebih dari dukungan atau peran UKM/UKM dan koperasi tersebut.

2. UMKM dalam Pergerakan Ekonomi Indonesia

Telah diakui bahwa UKM Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Bahkan, peran UKM diprediksi mampu menyelamatkan Indonesia dari dampak negatif krisis keuangan global 2008. UKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena bisnis mereka alami dan dinamis. Menurut Bank Dunia, penghidupan Indonesia masih sangat bergantung pada kelas menengah.

Sebagian besar UKM dan UKM bergerak di bidang perdagangan dan pertanian. Selain itu UKM dan UKM pada umumnya menyediakan kebutuhan dasar dan pokok masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kondisi ekonomi demikian, produk mereka tetap dibutuhkan di masyarakat, terutama di masyarakat rumahan.

Sebagian besar usaha kecil di Indonesia terkonsentrasi pada beberapa sektor, yaitu perdagangan, pengolahan makanan, pengolahan makanan, kayu dan produk kayu, tekstil dan pakaian, serta produk mineral bukan logam. Peran UMKM lainnya adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari sini dapat disimpulkan beberapa peran UKM dan UMKM di Indonesia:

a) Untuk memperkuat ekonomi dalam krisis.
b) Menjadi tulang punggung kegiatan perekonomian nasional.
c) Menawarkan banyak kesempatan kerja.
d) Meningkatkan nilai PDB nasional.
e) Mendorong pertumbuhan nilai ekspor.

Berbagai kontribusi UMKM bagi perkembangan ekonomi Indonesia dinilai sangat besar. Jumlah UMKM Indonesia pada tahun 2022 mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha atau sekitar 64 juta unit lebih Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% atau sekitar 8.500 triliun. UMKM juga berkontribusi tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia, yakni mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM juga mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi.

UMKM memberikan sumbangsih yang besar bagi ekonomi Indonesia. Hanya saja, perjalanan UMKM ini masih mengalami banyak kendala atau hambatan. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia, seperti :

a) Akses pemasaran produk yang tidak memadai.
b) Standarisasi produk yang tidak terjaga.

c) Pemahaman dalam penghitungan keuangan yang rendah.
d) Pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak, serta kewajiban dan tata cara pajak yang rendah.
e) Kesadaran pajak yang rendah. Bagi pelaku UKM dan UMKM yang paham pajak, enggan membayar pajak karena alasan tarif pajak yang dianggap memberatkan.
f) Permodalan yang rendah.
g) Kemampuan manajemen yang tidak memadai.
h) Orientasi target dan pengembangan produk yang rendah.

Tentu saja, pemerintah juga menyadari berbagai permasalahan UMKM yang ada tersebut. Dalam usaha untuk mengatasi berbagai kendala atau masalah tesebut, telah banyak dilakukan kebijakan oleh pemerintah. Beberapa pola kebijakan yang diambil dalam mendorong kontribusi dan perkembangan UMKM di Indonesia, di antaranya:

a) Sistem keterkaitan Bapak Angkat-Mitra Usaha.
b) Penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi

c) Mewajibkan Badan Usaha Milik Usaha (BUMN) untuk menyisihkan dana pembinaan sebesar 1%-5% dari keuntungan bersih untuk pengembangan UMKM.
d) Menugaskan lembaga perbankan untuk mengalokasian dana kredit bagi para pelaku usaha kecil dan koperasi sebanyak 20% dari portofolio kredit yang disalurkan (KUK).
e) Penyediaan Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia ke bank-bank lain untuk membiayai sebagian besar dari kebutuhan dana kredit bagi anggota koperasi primer.
f) Program Peningkatan Kemampuan Usaha.
g) Program Pengembangan Industri Kecil untuk Menunjang Ekspor.
h) Program Pengembangan Keterkaitan Sistem Bapak Angkat dengan Mitra Usahanya bagi BUMN dan Departemen.
i) Program Pengembangan Wiraswasta dan Tenaga Profesi.
j) Program Penelitian dan Pengembangan Industri Kecil.
k) Program Penciptaan/Pengaturan Iklim dan kerja sama.

l) Program Pengembangan dan Usaha Kecil dengan keterlibatan berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
m) Seminar dan Pameran Produk-produk Industri Kecil Tingkat Nasional hingga Internasional.
n) Penyediaan Sentra Industri Kecil dan UPT (Unit Pelayanan Teknis).
o) Penyediaan Tenaga Penyuluhan Lapangan (TPL).

Pemerintah memang menaruh perhatian khusus bagi perkembangan UMKM lantaran peran penting UMKM bagi pembangunan Indonesia. Kekuatan UMKM dengan kontribusinya bagi ekonomi Indonesia sangat besar karena memang sesuai karakter dan kondisi bangsa Indonesia yang memungkinkan dorongan UMKM yang kuat bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara luas.

Beberapa alasan yang membuat UMKM Indonesia mampu cukup kuat mempengaruhi ekonomi bangsa, misalnya karena pelaku UMKM di Indoensia yang sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah, mulai dari daerah perkotaan sampai daerah terpencil sekalipun. Hal ini memungkinkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga hampir 97%. Kondisi ini sekaligus membuat UMKM memiliki potensi dalam menyediakan lapangan

pekerjaan secara luas serta meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM

Dilihat dari sektornya, sektor pertanian menjadi UMKM yang paling banyak terdapat di Indonesia. Hal ini memberi efek secara tidak langsung dalam pembangunan nasional, terutama dalam masalah ketahanan pangan. Apalagi, Indonesia juga memiliki potensi yang tinggi di bidang pertanian. Keberadaan UMKM akan mendorong potensi ini jadi lebih berkembang.

Peran penting lain muncul karena karakter sektor UMKM Indonesia yang umumnya tidak memandang tingkat jenjang pendidikan, baik tinggi sampai rendah semua bisa menjadi pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan pemerataan ekonomi dan nerkontribusi dalam meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat karena keterbukaan lapangan kerja yang lebih luas dan fleksibel.

Fleksibilitas UMKM juga tampak dari ketahanan bisnis ini terhadap krisis. Bisnis UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi 1997/1998, bahkan pada krisis selanjutnya seperti pada tahun 2008, 2012, krisis pandemi dan resesi 2023, ketika dunia global dinilai mengalami guncangan keras dan menghasilkan koreksi pertumbuhan ekonomi.

UMKM juga dapat menjadi alat investasi di daerah pedesaan serta meningkatkan kemampuan berwirausaha. Produk dari UMKM relatif murah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia bisa dialihkan menjadi tabungan, hingga muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UMKM juga mampu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan zaman, salah satunya adalah semakin banyak UMKM memanfaatkan platform digital di era kemajuan teknologi digital saat ini. Ketika marketplace online tumbuh dan berkembang pesat, seperti ketika menghadapi masalah di era pandemi, banyak UMKM yang mampu menyesuaikan diri dan beralih mengandalkan pemasaran digital untuk mendukung eksistensi usahanya. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan beragam sehingga hal ini juga mempengaruhi produk yang dijual maupun cara pemasaran bisa bebas mengikuti kreatifitas pelaku UMKM.

C. Pendalaman Materi

Aktor penggerak ekonomi ekonomi Indonesia sangat luas. Salah satu aktor penting yang memiliki banyak pengaruh bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara luas adalah sektor UMKM. Bagaimana cara UMKM dapat berkontribusi dalam mendukung perkembangan, penguatan dan pemerataan ekonomi di Indonesia?

Bab V

Daya Saing Ekonomi bagi Industri Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami potensi daya saing global ekonomi Indonesia
2. Mahasiswa memahami karakteristik industri padat karya Indonesia
3. Mahasiswa memahami karakteristik industri padat modal dan otomatisasi Indonesia
4. Mahasiswa memahami sektor unggulan Indonesia bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan

B. Uraian Materi

1. Potensi Daya Saing Global Ekonomi Indonesia

Tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia yang disepakati bersama adalah membangun Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan menjadi salah satu dari 12 besar negara dunia pada tahun 2025 dan 8 besar negara dunia pada tahun

2045 melalui pertumbuhan ekonomi cepat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci status Indonesia sebagai negara maju yang mewujudkan kemakmuran nasional. Berkat daya saing yang tinggi, Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan merebut peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing negara dalam jangka panjang, pembangunan nasional akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendorong jaringan antardaerah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu parameter yang biasa digunakan untuk menilai daya saing suatu negara di dunia adalah Global Competitiveness Index (GCI) yang secara berkala diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF).

GCI adalah indeks yang mengukur kemajuan suatu negara dalam mengembangkan semua faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Indeks ini secara implisit mengukur seberapa efektif suatu negara menggunakan faktor produksinya, mengarah pada upaya memaksimalkan produktivitas total (TFP) dan mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga

bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan intervensi kebijakan yang efektif.

Berdasarkan Global Competitiveness Report 2019 yang diterbitkan WEF, skor daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei.[2] Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia berada di urutan ke-4 di ASEAN setelah Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 27) dan Thailand (peringkat ke-40). Menurut WEF, ekonomi makro yang stabil dan ukuran ekonomi yang besar merupakan kekuatan dalam daya saing internasional Indonesia, dan WEF mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah membuat kemajuan yang signifikan terkait infrastruktur transportasi. Khususnya dalam hal infrastruktur, Indonesia mendapat nilai yang sama dengan Thailand dan India, berada di atas Filipina, Vietnam, dan Brasil, tetapi masih di bawah Rusia, Malaysia, China, dan Singapura.

Infrastruktur menjadi salah satu harapan yang menggerakkan perekonomian, membuka lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi. Pada saat yang sama, infrastruktur juga meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan arus barang dan jasa, serta mengurangi biaya logistik, yang tentunya mengarah pada efisiensi ekonomi. Infrastruktur dianggap sebagai salah satu

pendorong utama dalam usaha peningkatan daya saing global produk industri, karena berhubungan dengan efisiensi produksi.

Produk-produk industri Indonesia terus didorong agar mampu memiliki daya saing global yang tinggi sehingga dapat diterima di pasar internasional. Muaranya, tentu diharapkan berbagai produk ini dapat menyumbang nilai ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan daya saing Indonesia menunjukkan bahwa produk-produk industri nasional semakin baik dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi ini merupakan pencapaian positif yang tak lepas dari peran manufaktur dalam negeri yang memanfaatkan berbagai instrumen pendukungnya, seperti teknologi digital terkini serta aktivitas riset untuk menciptakan inovasi.

2. Industri Padat Karya Indonesia

Proses pembuatan produk dalam industri dibagi menjadi dua bidang, yaitu industri padat karya dan industri padat modal. Kedua cara tersebut memiliki perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi Indonesia, kedua jenis industri ini memiliki

kontribusi masing-masing dalam perkembangan ekonomi bangsa.

Pengertian Industri Padat Karya

Industri padat karya adalah mekanisme produksi industri yang menekankan penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menghasilkan barang atau jasa. Tingkat intensitas tenaga kerja biasanya diukur menurut jumlah modal yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin besar proporsi biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, semakin padat karya perusahaan tersebut. Industri padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Sebagian besar negara berkembang padat karya karena biayanya lebih rendah daripada biaya permesinan. Hal ini memungkinkan ekonomi ini untuk berpartisipasi dalam produksi, sehingga mendorong pertumbuhan mereka.

Kekuatan dan keterbatasan industri padat karya

Industri padat karya memiliki keunggulan yaitu industri padat karya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga dapat mengurangi tingkat

pengangguran di suatu daerah. Selain itu, industri padat karya juga meningkatkan kesejahteraan dan tingkat produktivitas masyarakat.

Pada saat yang sama, industri padat karya dibatasi oleh tingkat produksi yang lebih rendah karena terbatasnya kecepatan manusia dibandingkan dengan mesin. Industri padat karya juga rentan terhadap kualitas produk yang tidak standar karena kesalahan manusia tidak dapat dikesampingkan. oleh karena itu kualitas produk tidak terkontrol. Produk mekanik dapat distandarisasi dan dengan demikian memenuhi standar kualitas produk. Industri padat karya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, ada juga beberapa kelemahan yang membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan efisien dibandingkan dengan industri padat modal yang menggunakan mesin-mesin canggih.

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan industri padat karya yaitu:

a) Isu ketenagakerjaan : upah minimum, adanya pemogokan tenaga kerja yang dianggap mengganggu operasional perusahaan;
b) Peningkatan produktivitas kerja yang dianggap tidak sebanding dengan peningkatan upahnya;

c) Sulitnya mencari tenaga kerja yang terampil, contoh: industri di Morowali yang mengalami kesulitan mencari tenaga kerja,
d) Infrastruktur : ketersedian dan koneksi dengan infrastruktur lainnya,
e) Izin kawasan industri,
f) Ketersediaan lahan.

Di Indonesia, pemerintah lebih menekankan pada industri padat karya daripada industri padat modal dalam hal pengerahan sumber daya manusia. Di sisi lain, perusahaan tidak ingin membayar pekerja lebih banyak karena itu bisa mengurangi tingakt efisiensi. Karenanya, banyak perusahaan ingin menggunakan modal secara intensif. Meski demikian, perkembangan industri padat karya masih tetap berjalan. Selain itu, beberapa jenis perusahaan ada yang mempertahankan konsep industri padat karya demi meningkatkan posisi tawar dengan pemerintah terkait berbagai kebijakan pajak, izin dan lainnya.

Contoh industri padat karya yang masih banyak berkembang di Indonesia, seperti:

1. Industri alat tulis
2. Industri anyaman
3. Industri bata
4. Industri bola

5. Industri boneka
6. Industri bulu mata
7. Industri caping
8. Industri cat
9. Industri furnitur
10. Industri genteng
11. Industri jaket
12. Industri kaos kaki
13. Industri kardus
14. Industri kosmetik
15. Industri meja dan kursi
16. Industri minuman
17. Industri minyak
18. Industri percetakan buku
19. Industri pernak pernik
20. Industri plastic
21. Industri raket
22. Industri rokok
23. Industri sabuk
24. Industri sandal
25. Industri sarung bantal guling
26. Industri sepatu
27. Industri snack
28. Industri susu
29. Industri tahu
30. Industri tas
31. Industri tekstil
32. Industri tempe
33. Industri tepung
34. Industri tikar
35. Industri topi
36. Industri wig

Industri yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Industri padat karya adalah industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Namun, investasi di Indonesia saat ini didominasi oleh industri padat modal yang tidak dapat diperdagangkan yang hanya

mempekerjakan sedikit tenaga kerja dan menawarkan peluang peningkatan impor Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berharap dapat membuka peluang investasi pada sektor padat karya yang dapat menghasilkan barang.

3. Industri Padat Modal Indonesia

Industri padat modal membutuhkan modal dalam jumlah besar dan menggunakan teknologi canggih. Jenis industri ini merupakan industri yang menghasilkan produk yang besar. Industri padat modal membutuhkan peralatan yang lebih canggih dalam proses produksinya dibandingkan jumlah tenaga kerja.

Karena industri padat modal menghasilkan barang seperti mesin, elektronik dan logam. Oleh karena itu, sejumlah besar mesin teknologi canggih diperlukan. Tenaga kerja manusia hanya ada sebagai operator mesin.

Jenis industri padat modal ini biasanya tersebar luas di negara-negara maju. Hal ini sangat didukung oleh sumber permodalan yang memadai. Selain itu, upah tenaga kerja manusia lebih mahal di negara maju, sehingga lebih banyak tenaga mesin yang digunakan dalam proses produksi.

Negara maju yang ingin memproduksi barang dengan mesin canggih harus menghemat anggaran agar

tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Industri padat modal meliputi industri dasar atau hilir seperti permesinan, logam dasar, dan elektronik. Industri padat modal adalah industri yang lebih menekankan dan mengandalkan penggunaan mesin daripada penggunaan tenaga manusia dalam proses produksinya karena menggunakan teknologi tinggi.

Di negara berkembang, teknik produksi padat karya umumnya digunakan karena faktor produksi tenaga kerja manusia lebih banyak tersedia di negara berkembang. Sebaliknya, teknik produksi yang digunakan di negara industri cenderung padat modal, karena di negara maju lebih banyak modal daripada tenaga kerja dan bahkan harga tenaga kerja relatif lebih tinggi.

Industri padat modal biasanya didasarkan pada keinginan untuk mencapai tingkat produksi yang optimal dengan biaya produksi per unit yang rendah, sehingga harga jual menjadi murah. Melalui penggunaan teknologi, produktivitas tenaga kerja tetap tinggi dan stabil, serta kualitas produk dapat diperhatikan. Hambatan terbesar dalam memilih padat modal adalah investasi dan modal awal yang sangat tinggi, namun hal ini dapat diatasi dengan pinjaman.

Di Indonesia, industri padat modal juga mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangannya. Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2022-2024 memandu proses industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, menyediakan sektor usaha formal bagi masyarakat dan mencapai produktivitas yang tinggi. Selain industri padat karya, pemerintah juga memasukkan industri padat modal dalam prioritas pembangunan. Misalnya, pada tahun 2023, industri di luar pengolahan migas diperkirakan tumbuh sebesar 7,7%, dengan pangsa produk domestik bruto meningkat menjadi 18,4% dan pangsa ekspor menjadi 76,0%.

Lebih spesifik, contoh industri padat modal yang banyak berkembang di Indonesia, seperti:

1. Industri mobil
2. Industri sepeda motor
3. Industri pesawat
4. Industri kapal
5. Industri minyak dan gas bumi
6. Industri batu bara
7. Industri tambang emas
8. Industri mesin-mesin pertambangan
9. Industri alat elektronik
10. Industri beton
11. Industri kereta api
12. Industri pertambangan

Meskipun Indonesia lebih cocok untuk memanfaatkan industri padat karya, investasi di Indonesia justru menghasilkan industri padat modal. Industri padat modal juga diperlukan untuk mempertahankan daya saing dan mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi yang tinggi. Negara-negara berkembang berubah dari industri primer menjadi industri sekunder. Pada saat yang sama, negara-negara maju berubah dari industri sekunder menjadi industri tersier.

Pemerintah mengakui meskipun investasi saat ini lebih padat modal, namun sektor padat karya atau padat karya akan tetap bertahan karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja yang besar. Saat ini realisasi investasi padat modal mencapai 60% dan padat karya 38,1% dari realisasi total investasi tahun lalu. Rendahnya investasi di daerah padat karya melemahkan penggunaan tenaga kerja. Industri padat modal masih diperbolehkan sepanjang dapat menyediakan lapangan kerja ekonomi bagi pekerja.

C. Pendalaman Materi

Indonesia memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menopang daya saing ekonomi bangsa. Sektor unggulan ini dapat dibagi dalam industri padat karya dan padat modal, yang keduanya memiliki keunggulan serta keterbatasannya sendiri. Jelaskan keunggulan dari industri padat karya dan padat modal, serta bagaimana masing-masing jenis industri ini mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing ekonomi di Indonesia!

Bab VI

Struktur Sosial Budaya dalam ekonomi Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami struktur sosial budaya masyarakat Indonesia
2. Mahasiswa memahami hubungan struktur sosial budaya dengan ekonomi Indonesia
3. Mahasiswa memahami masalah kemiskinan dan ketimpangan Indonesia
4. Mahasiswa memahami masalah ketenagakerjaan dan kependudukan di Indonesia
5. Mahasiswa memahami indeks pembangunan manusia di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Hakikat Struktur Sosial Budaya

Tujuan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai sarana dan aset penunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan dalam berbagai bidang harus terus dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan serta tuntutan zaman. Proses

pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual, maupun material. Karena berkenaan erat dengan masyarakat, pembangunan ini pun banyak berhubungan dengan struktur sosial dalam masyarakat.

Struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur sosial di masyarakat. Struktur sosial ini selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak berdampak bagi pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di masyarakat tersebut. Secara umum, struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a) Struktur sosial bersifat abstrak

   Struktur sosial bersifat abstrak, yang artinya tidak dapat dilihat atau diraba. Misalnya dalam sebuah negara terdapat struktur organisasi pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Apabila digabungkan akan membentuk kesatuan 'bangunan' abstrak suatu masyarakat.

b) Struktur sosial memiliki cakupan yang luas di masyarakat

Struktur sosial mencakup pada dimensi yang luas, baik itu secara vertikal berupa hierarki status sosial dalam sistem masyarakat dan secara horizontal yaitu keseluruhan masyarakat dengan karakteristik yang sama.

c) Struktur sosial merupakan bagian dari kebudayaan di dalam masyarakat

Struktur sosial dalam suatu masyarakat berfungsi untuk mengontrol atau mengatur berbagai bentuk hubungan antarindividu dalam masyarakat.

d) Struktur sosial sebagai landasan proses sosial masyarakat

Proses sosial yang terjadi sangat dipengaruhi oleh bentuk struktur sosial masyarakatnya. Misalnya, pada masyarakat dengan struktur sosial yang kaku, maka proses sosial akan cenderung lebih sulit dilakukan.

e) Struktur sosial bersifat dinamis

Struktur sosial bersifat dinamis sehingga selalu berkembang dan dapat berubah-ubah.

2. Struktur Sosial Budaya dan Ekonomi

Struktur sosial budaya berkaitan erat dengan ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pendekatan multidisiplin, termasuk strategi berbasis komunitas, untuk mengatasi masalah terkait pembangunan ekonomi di masyarakat.

Inti dari strategi pembangunan ekonomi di masyarakat adalah mendorong setiap individu warga negara untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan kolektif terhadap berbagai risiko seperti kejahatan. Partisipasi dapat berupa donasi moneter (*fee*) dan donasi nonmoneter (waktu dan bentuk lainnya) untuk menyediakan fasilitas fisik dan non fisik untuk memberikan keamanan (*public good*) di tingkat masyarakat (*private good of provide public services*) untuk menyediakan

Persoalannya, dalam struktur sosial ekonomi masyarakat yang sangat heterogen, pemahaman ini menjadi tantangan besar. Keputusan partisipasi individu dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan tempat tinggalnya (*neighborhood effect*). Warga negara memiliki keinginan untuk bekerja demi kebaikan bersama ketika mereka berbagi rasa saling percaya dan solidaritas. Artinya,

ketika orang yang tinggal di suatu daerah saling percaya, mereka siap membantu satu sama lain dalam berbagai cara bahkan dalam situasi krisis yang berbahaya atau tidak menyenangkan.

Dalam konteks ini, kesediaan untuk campur tangan menjadi sangat penting. Pada saat yang sama, kepercayaan dan solidaritas bersifat fungsional, karena kehadiran unsur-unsur tersebut cenderung meningkatkan kemauan warga untuk melakukan intervensi. Kemauan warga negara untuk melayani kebaikan bersama adalah bentuk kontrol sosial informal. Sampson dan Raudenbush memperkenalkan ini secara khusus melalui teori kemanjuran kolektif. Mereka mendefinisikan efektivitas kolektif sebagai hubungan kohesi dan saling percaya di mana harapan bersama campur tangan untuk mendukung kontrol sosial informal terhadap lingkungan.

Dalam konsep ekonomi, struktur sosial budaya sebagai output (produk), yang mempengaruhi kekuatan kontrol sosial informal yang bervariasi secara dinamis. Kontrol sosial akan menguat karena semakin banyak warga yang mendukungnya. Sebaliknya, kekuatan kontrol sosial berkurang ketika lebih sedikit anggota masyarakat yang mau campur tangan dan berpartisipasi.

Hal ini dijelaskan oleh dua (dua) mekanisme. Pertama, manfaat kontrol sosial dalam bentuk keputusan intervensi membawa risiko baik yang nyata maupun yang dirasakan. Pengambilan keputusan bisa menjadi proses yang kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk manfaat yang diharapkan. Warga cenderung mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan intervensi mereka. Perhitungan biaya-manfaat Anda secara signifikan dipengaruhi oleh risiko dan manfaat yang dirasakan dari prosedur ini. Selain insentif sosial yang dilaksanakan dalam bentuk dukungan penuh masyarakat, dari segi biaya-manfaat, semakin besar dukungan masyarakat, semakin rendah biaya yang ditanggung setiap orang dalam penerapan sanksi sosial.

Kedua, kepercayaan antar tetangga dan kepercayaan pada kemampuan mekanisme kontrol sosial formal untuk memberikan dukungan merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Persepsi individu bahwa kurangnya intervensi dapat memperburuk masalah memotivasi mereka untuk melakukan intervensi. Ketika seorang anggota masyarakat yakin bahwa mereka akan menerima dukungan dari anggota masyarakat dalam situasi berbahaya terkait intervensi, mereka akan lebih percaya diri untuk

melakukan intervensi. Demikian pula, kepercayaan terhadap keterampilan dan adanya kontrol sosial formal di masyarakat berpengaruh positif terhadap keputusan intervensi.

C. Pendalaman Materi

Struktur sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jelaskan bagaimana korelasi struktur sosial budaya yang ada di Indonesia terhadap kondisi ekonomi dan agenda pembangunan di masyarakat Indonesia!

Bab VII

Pembangunan Ekonomi dalam Otonomi Pedesaan di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami konsep otonomi daerah
2. Mahasiswa memahami konsep pembangunan ekonomi di pedesaan Indonesia
3. Mahasiswa memahami konsep pemberdayaan ekonomi pedesaan

B. Uraian Materi

1. Otonomi Daerah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Karena luasnya wilayah Indonesia, sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur wilayahnya melalui sistem terpusat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat seperti sistem desentralisasi. Desentralisasi Indonesia berlangsung melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah ini akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi

bagi pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Kali ini kita membahas bagaimana otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Lebih khusus lagi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 (1) UUD 1945.

Pasal ini menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Kemudian, ayat (2) juga menjelaskan bahwa "pemerintah negara bagian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersama".

Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dapat kita pahami bahwa Indonesia adalah negara kesatuan (eeneeheedsstaat). Oleh karena itu, tidak ada daerah di seluruh Indonesia yang juga berbentuk negara. Sederhananya, Indonesia bukanlah federasi atau negara. Oleh karena itu, dilakukan pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah provinsi. Kemudian provinsi tersebut dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

Daerah yang lebih kecil ini bersifat otonom (streek dan local Rechtsgemeenschhappen) atau administratif.

Sederhananya, penjelasan undang-undang berfungsi untuk memastikan bahwa pembagian wilayah kedaulatan Indonesia menjadi beberapa wilayah besar dan kecil dapat mandiri atau dapat memimpin rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan § 18 UUD 1945 dilakukan dengan bantuan undang-undang otonomi negara tersendiri.

Sejarah otonomi daerah Indonesia dimulai pada tahun 1903 ketika pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Lembaran Negara No. 329, yang menawarkan kesempatan untuk membentuk unit pemerintahan dengan ekonominya sendiri. Ini adalah kebijakan otonomi daerah pertama kali diperkenalkan di Indonesia.

Kemudian, pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menekankan asas desentralisasi dan mengatur pembentukan panitia daerah, keresidenan KND, kabupaten dan kota otonom. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peraturan Pokok Pemerintahan Otonom di Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

menegaskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu provinsi, wilayah administratif atau kota, desa. . atau di kota-kota kecil.

Setiap daerah berhak mengurus anggarannya sendiri. Perkembangannya berlanjut ketika pada tahun 1957 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, menggantikan istilah "daerah otonom" dengan istilah "daerah otonom". Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah besar dan kecil. Selain itu, pada tahun 1996, pemerintah diberdayakan dengan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996.

Berkenaan dengan Hari Pemerintahan Daerah, tanggal 25 April adalah Hari Pemerintahan Daerah yang kita rayakan bersama. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan BJ Habibie mengambil alih sebagai presiden. Ia percaya Indonesia bisa lebih baik jika masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengelola wilayah mereka sendiri semaksimal mungkin. Atas inisiatif dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa daerah

diberi kewenangan penuh atas politik luar negeri kecuali pertahanan, peradilan, uang dan lain-lain.

Undang-undang baru ini diterima dengan antusias sebagai tonggak reformasi. Sebelum tahun 2004 dibentuk Daerah Otonom (DOB) baru. Sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Model pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, mengingat besarnya potensi daerah.

Penyempurnaan konsep otonomi terus berlanjut hingga tahun 2004. Selama masa jabatan presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, ia menyadari kelemahan undang-undang sebelumnya dan percaya bahwa otonomi daerah dapat ditingkatkan jika pemerintah pusat mendapat instruksi yang tepat. Oleh karena itu, pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga menjabarkan pilar-pilar yang harus dipertahankan untuk mencapai keberhasilan.

Otonomi daerah diperluas. Tak hanya itu, berkat akumulasi pengalaman, pemerintah di bawah kepemimpinan presiden keenam, Susilo Bambang

Yudhoyono, pada 2014 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih banyak mengatur tentang pembagian kekuasaan dan wilayah. Undang-undang ini juga mengatur tentang koordinasi antar pimpinan daerah dan menciptakan forum untuk bertukar pikiran dan saling mendukung, dan dalam lampirannya mengatur secara rinci pembagian urusan ketatanegaraan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yaitu. H. menjadi masalah paralel.

Hingga tahun 2022, telah terbentuk 34 provinsi, 416 wilayah administratif, dan 98 kota. Sejak saat itu, pemerintah pusat melakukan segalanya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah menemukan jati dirinya dan terus berkiprah secara global. Untuk menjawab tantangan persaingan global dan Revolusi Industri 4.0, daerah terus berinovasi menciptakan sistem dan aplikasi teknologi yang optimal (*smart city*).

Dalam pemberlakuan otonomi daerah, masih perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa hal yang kewenangannya masih diatur negara kesatuan atau pemerintah pusat, seperti:

a) Hubungan luar negeri
b) Pengadilan
c) Moneter dan keuangan

d) Pertahanan dan keamanan

Selain keempat hal tersebut, kewenangan untuk mengatur dan mengurus diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya sendiri. Dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, diwujudkan dalam hal:

a) **Desentralisasi** yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
c) **Tugas perbantuan** adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, setiap daerah otonomi di Indonesia diberikan hak yaitu:

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b) Memilih pimpinan daerah
c) Mengelola aparatur daerah
d) Mengelola kekayaan daerah
e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pembangunan Ekonomi Peedesaan

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan APBD berdasarkan prakarsa dan kemampuan daerah. Selain pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mendorong pelaksanaan otonomi desa bagi desa-desa di wilayahnya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

manajemen pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola bottom up agar lebih cepat terwujud kemandirian dan kesejahteraan warga desa.

Desa merupakan sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, perwujudan kemandirian atau otonomi pemerintahan desa akan menjadi lebih jelas. Otonomi yang bukan asal otonomi, melainkan juga dapat membuahkan demokrasi yang sifatnya partisipatif dalam pembangunan ekonomi desa secara menyeluruh di wilayah pedesaan Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada desa berbeda dengan otonomi pemerintahan kabupaten/ kota/ provinsi. Otonomi desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat, bukan pada kewenangan pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten. Gagasan dasar yang perlu dikembangkan saat ini adalah keberagaman,

partisipasi, otonomi sejati, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa. Urusan pemerintahan tergantung pada asal usul kota, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota diserahkan kepada kota.

Konsep otonomi desa sebenarnya merupakan konsep yang dimaknai sebagai kemampuan dan prakarsa masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Artinya gangguan dari luar desa harus dihindari atau paling tidak dikurangi seminimal mungkin. Sementara itu, sifat otonomi desa terletak pada otonomi murni, artinya keberadaan otonomi desa sudah ada sejak desa berdiri dan bukan merupakan amanat dari negara.

UU Desa menempatkan desa sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pasal 18B aya 2 dan Pasal 18 ayat 7. Dalam UU Desa tersebut, dibentuk tatanan desa yang memposisikan diri sebagai *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan tersebut diharap

mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi fondasi keragaman NKRI, sebab jumlah desa di Indonesi yang begitu banyak dan mendominasi struktur sosial budaya di masyarakat Indonesa.

Terdapat beberapa asas pengaturan desa dalam Undang-Undang ini yang berupa:

a) Rekognisi,
b) Subsidiaritas,
c) Keberagaman,
d) Kebersamaan,
e) Kegotong-royongan,
f) Kekeluargaan,
g) Musyawarah,
h) Demokrasi,
i) Kemandirian,
j) Kesetaraan,
k) Pemberdayaan, dan
l) Keberlanjutan.

Dengan UU Desa tersebut, diharapkan dapat terwujud peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desanya masing-masing. Selain itu, kewenangan yang diberikan kepada

desa ini diharap dapat mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dan seluruh perangkat desa yang ada di dalamnya, dituntut dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, seperti dalam hal perumusan kebijakan desa seperti Perdes dan APB Desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang harus disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa, kebutuhan atau karakter desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa seperti dalam hal administrasi kependudukan dan kesehatan.

Sebagai wujud nyata upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa, desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya serta lembaga lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang berkaitan dengan hak asal usul desa meliputi pembentukan peraturan desa (perdes), pengurusan pemerintahan desa, pengambilalihan pimpinan pemerintahan desa, pemilikan barang milik desa, menjelaskan dan memastikan sumber pendapatan desa, penguatan masyarakat desa melalui peningkatan . gotong

royong dalam pemerintahan dan pembangunan, dan Penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, para perangkat desa harus memperhatkan asas pengaturan desa, yang meliputi:

a) **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
b) **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
c) **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
d) **Kegotong-royongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa

Keberadaan asas-asas tersebut adalah hal penting sebagai upaya untuk meneguhkan eksistensi desa yang dianggap mampu berkontribusi besar terhadap

perekonomian bangsa, sekaligus dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa mempunyai beberapa kewenangan, yang meliputi :

a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b) Kewenangan lokal berskala Desa;
c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memajukan desa, pemerintah desa dapat membentuk unit usaha yang disebut "Usaha Desa" yang dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Korporasi desa dapat mengelola korporasi komersial dan/atau publik. Layanan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelaksanaan pengelolaan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penguatan

masyarakat desa, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga. Dalam beberapa dekade terakhir, kata "pembangunan" banyak diperbincangkan di antara berbagai kalangan, antara lain kalangan birokrat, politikus, akademisi dan profesional, serta kelompok masyarakat yang bergairah dan tertarik pada upaya peningkatan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Pembangunan yang ditujukan untuk pertumbuhan tingkat makro sebenarnya membawa banyak bencana bagi sebagian besar orang yang kehidupannya membaik. Oleh karena itu, setelah kegagalan teori dan model pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan, banyak kabupaten yang mengalihkan fokusnya ke pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Hal ini memerlukan optimalisasi sumber daya lokal, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

C. Pendalaman Materi

Pembangunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembangunan di berbagai daerah pedesaan, karena jumlah desa dengan luasannya yang mendominasi berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk menaruh perhatian lebih bagi desa, sehingga ditetapkan otonomi desa yang semakin kuat. Jelaskan dengan menggunakan contoh dan analisis SWOT, terkait implementasi otonomi desa yang menunjukkan kesuksesan target pemerintah dalam pembangunan!

Daftar Pustaka

Arvis, Jean-François, dkk.. 2018. Connecting to Compete 2018: Trade Logistics in the Global Economy.Washington. World Bank.

Boediono. 2016. Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Mizan Pustaka.

Damanik, dkk. 2021. Sistem Ekonomi Indonesia. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.

Fahrika, Andi Ika & Zulkifli. 2020. Perekonomian Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode.

Hidayat, Muhammad Firman.dkk. 2021. Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.Jakarta.Bappenas.

Labetubun, dkk. 2021. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta : Penerbit Republika.

Schwab, Klaus.2019. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.Swiss.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Profil Penulis

Hasna Wijayati, S.IP.,M.A.

Hasna adalah seorang dosen tetap yang saat ini berhomebase di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perempuan kelahiran tahun 1990 ini mendapat amanah sebagai dosen pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di FISIP, UNISRI sejak tahun 2018. Konsentasi studi yang ia ambil adalah berkaitan dengan ekonomi politik internasional, sehingga ia pun dipercaya mengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Selain mengajar, ia juga aktif melaksanakan tri dharma, sekaligus utamanya ia rajin menghasilkan berbagai buku, baik karya populer maupun hasil riset. Ini tak luput dari hobinya yang gemar menulis dan kiprahnya yang telah dipercaya menghasilkan berbagai buku yang diterbitkan pada skala nasional. Karenanya, guna mendukung dan meningkatkan kontribusi pemikirannya dalam pendidikan, ia pun menuangkan tulisannya dalam buku Sistem Ekonomi Indonesia ini, yang diharap bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari sistem ekonomi Indonesia, dari universitas mana pun.